

ABSTRAK

Pemerintahan Devisa merupakan satuan lembaga pemerintahan paling bawah dalam struktur negara, dimana lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Devisa juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Luar Negeri. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Secara substansi peraturan terkait devisa antara lain mengatur tentang persyaratan administrasi pencalonan kepala devisa dan juga mengatur pembiayaan pemilihan kepala devisa yang dibebankan pada APBD. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian Normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan. Kerangka penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang lazim digunakan, salah satunya adalah statute approach, conceptual approach, comparative approach, dan analytical approach. Adapun Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana aturan yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Konflik ini muncul dalam pengaturan anggaran pemilihan kepala desa, di mana Peraturan Bupati Sumenep memungkinkan pembebanan anggaran pada APBD atau APBDesa untuk biaya Ujian Kepemimpinan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa biaya pemilihan kepala desa harus dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya penyesuaian atau revisi terhadap Peraturan Bupati tersebut agar konsisten dengan hierarki peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pilkades, Peraturan Bupati, Kabupaten Sumenep

ABSTRACT

The Foreign Administration is the lowest unit of government institution in the state structure, where this institution is regulated through Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Foreign Administration in conjunction with Law Number 6 of 2014 concerning Foreign Affairs. Therefore, the government has the task of organizing government, development, and community affairs. Substantially, regulations related to foreign exchange, among others, regulate the administrative requirements for nominating the head of foreign exchange and also regulate the financing of the election of the head of foreign exchange which is charged to the APBD. The method used is Normative research method by attempting to conduct an assessment through a full reading and maximum analysis of the legislation. Within the framework of legal research there are several approaches that are commonly used, one of which is the statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and analytical approach. The Penelitian conducted by the author includes. The result of this study is that the Sumenep Regent Regulation Number 54 of 2019 contradicts the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, where lower rules should not conflict with higher rules. This conflict arises in the budgetary arrangements for village head elections, where the Sumenep District Head Regulation allows budgetary charges to the APBD or APBDesa for Leadership Exam costs. This contradicts Sumenep District Regulation No 3 of 2019 and Minister of Home Affairs Regulation No 112 of 2014, which stipulate that village head election costs must be charged to the district/city APBD. This discrepancy indicates the need for adjustments or revisions to the Regent Regulation to be consistent with the hierarchy of applicable regulations.

Keywords: Pilkades, Regent Regulation, Sumenep District